

# Analisis Peningkatan Angka FDI *Inflows* Arab Saudi Di Tengah Keterlibatan Pemerintah Arab Saudi DALAM Pelanggaran HAM

Arva Salsa Ramadhanty<sup>1)</sup>, A.A Ayu Intan Parameswari<sup>2)</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [arvaponty@gmail.com](mailto:arvaponty@gmail.com)<sup>1)</sup>, [prameswari.intan@gmail.com](mailto:prameswari.intan@gmail.com)<sup>2)</sup>, [kawitriresen@gmail.com](mailto:kawitriresen@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This research objective is to explain the increment of Saudi Arabia's FDI inflows in 2017-2019 amidst the involvement in human rights abuse. As it is known, Saudi Arabia has bad reputations on human rights. Saudi involvement on human rights abuse in 2017-2018 has provoked the international community and threaten the reputation of Saudi on foreign investment. But these do not make the Saudi's FDI inflows showed a significant decrease. This research uses explanative qualitative as the research method. The framework of this research is using Foreign Policy and Human rights and also The Bottleneck Effect and The Social Risk on FDI. The research showed an answer that Saudi's involvement in human rights abuse does not affect the FDI inflows because Saudi has been working on planning to attract the foreign investment with their foreign policy and KSA Vision 2030.*

**Keywords:** FDI, Human Rights, KSA Vision 2030, Saudi Arabia

## 1. PENDAHULUAN

Arab Saudi merupakan sebuah negara yang berada di timur tengah dengan sistem monarki yang dipimpin langsung oleh seorang raja. Arab Saudi juga memiliki undang-undang dasar yang berjudul *The Basic Law 1992*. Undang-undang ini mengatur segala aturan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat Arab Saudi termasuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, pelanggaran HAM di Arab Saudi masih sering terjadi. Pelanggaran tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan sosial maupun ekonomi di negara tersebut. Pelanggaran HAM tersebut ini dikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan sosial maupun ekonomi Arab Saudi. Arab Saudi sendiri merupakan negara yang kaya. Namun

kekayaan Arab Saudi kini sangat bergantung dengan sektor minyak dan gas. Pemerintah Arab Saudi pun berambisi ingin membuka peluang ekonomi lainnya seperti teknologi dan pariwisata agar ekonomi Arab Saudi tidak terlalu bergantung dengan minyak dan gas. Maka dari itu, pada tahun 2016 pemerintah Arab Saudi menyusun sebuah *blueprint* kebijakan yang disebut dengan *Kingdom Saudi Arabia Vision 2030* atau KSA Vision 2030. Diharapkan, melalui KSA Vision 2030 ini, ekonomi Arab Saudi akan lebih imbang di sektor lainnya.

Di dalam KSA Vision 2030, terdapat tiga pilar yang terdapat dalam visi ini, yaitu, *A Vibrant Society, A Thriving Economy, An Ambitious Nation*. Ketiga pilar ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam membawa Arab Saudi lebih terbuka. Perekonomian

dan kehidupan Arab Saudi sangat bergantung dengan minyak dan gas. Melalui KSA Vision 2030 ini diharapkan Arab Saudi mampu menggerakkan ekonomi lewat sektor lainnya. Tentunya dengan memperbaiki keadaan sosial yang ada di Arab Saudi, ini dapat menjadi langkah awal ke arah yang lebih baik. Salah satu yang ingin dicapai oleh Arab Saudi adalah *Foreign Direct Investment* (FDI). FDI merupakan sebuah investasi yang dilakukan oleh pembisnis maupun perusahaan di sebuah negara dalam bentuk korporasi ataupun bisnis lainnya. Keberadaan KSA Vision 2030 ini juga sebuah bukti untuk memperbaiki infrastruktur dan diharapkan dapat mengundang investor luar dan meningkatkan angka FDI Arab Saudi.

Mengubah keadaan sosial yang ada di Arab Saudi melalui KSA Vision 2030 ini juga melibatkan beberapa aspek mengenai keadaan hak asasi manusia Arab Saudi. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa Arab Saudi seringkali terlibat dengan pelanggaran HAM yang terjadi. Namun, tidak lama ketika KSA Vision 2030 ini dipublikasikan, pemerintah Arab Saudi pun mencabut peraturan represif seperti peraturan yang melarang wanita di Arab Saudi untuk berkendara. Sejak Juni 2018, peraturan ini pun dicabut secara resmi dan memberikan hak untuk para wanita untuk berpergian dan berkendara tanpa izin suami maupun anggota keluarga inti laki-laki (New York Times. 2019). Hal ini disambut positif oleh dunia maupun masyarakat Arab Saudi sendiri.

Namun, tidak lama setelah peraturan tersebut dicabut, pemerintah Arab

Saudi masih terlibat dengan pelanggaran HAM. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, keterlibatan pemerintah Arab Saudi terhadap perang sipil di Yaman, dan penangkapan aktivis HAM dan perempuan tanpa adanya tuntutan yang jelas. Pelanggaran HAM ini sontak membuat dunia internasional mengecam tindakan Arab Saudi. Banyak investor asing yang akhirnya menjauhkan diri sementara agar tidak terlibat secara langsung dengan pelanggaran HAM yang terjadi. Salah satunya ketika ada sebuah konferensi investor di Riyadh pada tahun 2018, eksekutif dari perusahaan-perusahaan besar seperti JP Morgan, Uber, dan Ford pun enggan menghadiri acara tersebut setelah berita pembunuhan Jamal Khashoggi tersebar (Reuters, 2018). Tak hanya itu, sekitar Gulf Center for Human Rights (GC4HR) dan 179 organisasi yang bergerak dibidang HAM pun menuntut Arab Saudi mundur dari keanggotaan mereka di *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) karena tidak sejalan dengan resolusi Majelis Umum 60/251 pada paragraf 8 (GC4HR. 2018). Kecaman dunia internasional ini pun dikhawatirkan dapat mengganggu kebijakan-kebijakan Arab Saudi yang disusun untuk dapat mengundang investor asing.

Namun, pada kenyataannya, pelanggaran HAM yang terjadi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap angka investasi Arab Saudi. Menurut data dari World Bank, FDI *inflows* Arab Saudi justru meningkat dari angka 0.206 ke 0.54 dari tahun 2017 ke 2018 (World Bank Org).

Menurut Vadlamannati (2008) dalam konsepnya tentang *bottleneck effect*, menjelaskan bahwa pemerintahan yang terlibat dalam pelanggaran HAM akan membuat reputasi investor maupun perusahaan yang terlibat dengan negara tersebut kurang baik. Namun, pelanggaran HAM yang terjadi di Arab Saudi tidak terlalu menunjukkan penurunan FDI di Arab Saudi. Hal ini pun memunculkan beberapa pertanyaan seperti, apakah memang HAM tidak memberikan perubahan signifikan terhadap angka investasi di Arab Saudi.

Tahun 2019 menjadi tahun dimana pemerintah Arab Saudi mampu menyerap beberapa investasi asing dari perusahaan beberapa negara. Menurut laporan tahunan yang dirilis oleh *Invest Saudi* yaitu "*Investment Highlights*", pada tiga kuartal pertama tahun 2019 ada kenaikan FDI yang terjadi. Perusahaan-perusahaan dari India, Amerika Serikat, Yordania, Britania Raya, Mesir, Tiongkok, dan Perancis merupakan investor aktif pada tahun 2019 dan memberikan peningkatan terhadap angka FDI Arab Saudi setiap kuartalnya. Perusahaan-perusahaan ini melakukan investasi di beberapa sektor, seperti pariwisata & industri hiburan, pendidikan, kesehatan, petrokimia, dan industri maritim.

Arab Saudi sempat menjadi sorotan dunia internasional dan mendapatkan kecaman atas pelanggaran HAM yang terjadi yang membuat para investor asing enggan berinvestasi sejenak agar tidak terlibat dengan kasus HAM yang ada. Namun pada kenyataannya, dunia internasional tetap melakukan investasi di Arab Saudi. Mengutip pemaparan dari

Blanton dan Blanton (2006) dalam karya tulisnya yang mengatakan bahwa HAM memang sejatinya bukan lah indikator utama jika dibandingkan dengan indikator lain namun HAM bisa dijadikan salah satu tolak ukur dalam melihat keadaan politik dari negara yang ingin dituju (Blanton dan Blanton, 2006, 479). Penelitian ini akan menganalisa lebih dalam mengenai FDI dan kasus pelanggaran HAM di Arab Saudi dan menjawab pertanyaan mengenai kenaikan investasi Arab Saudi.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### '*Bottleneck effect*' dan Resiko Sosial dalam FDI

Foreign Direct Investment atau FDI merupakan sebuah investasi langsung dari negara lain terhadap negara yang ingin dituju untuk kepentingan bisnis yang dapat berbentuk merger, akuisisi, ritel, layanan, logistik dan manufaktur (Investopedia, 2020). Dalam menanamkan investasinya, investor asing akan memilih negara yang mereka anggap layak untuk diinvestasikan. Ada empat determinan FDI menurut Elimam, yaitu (Elimam, 2017, hal. 224)

- Keadaan ekonomi, seperti pembangunan ekonomi, struktur ekonomi, banyaknya sumber daya alam suatu negara sebagai daya tarik bagi FDI.
- Kebijakan negara, seperti aturan, regulasi, hukum dan sebagainya.
- Kebijakan sektor industri.
- Faktor politik, seperti stabilitas politik.

Investor asing biasanya akan menimbang kembali dari beberapa aspek

sebelum menanamkan investasinya di suatu negara. Ketidakstabilan keadaan politik maupun ekonomi, regulasi yang kurang fleksibel, pembangunan yang lemah pada suatu negara menjadi indikator penting bagi investor asing untuk melakukan FDI ke suatu negara (Elimam, 2017, hal. 224). Efisiensi dari sebuah pemerintahan akan menjadi nilai tambah bagi investor asing dalam berinvestasi, begitupun sebaliknya. HAM sering kali dijadikan sebuah indikator dalam FDI. Walaupun beberapa literatur percaya bahwa HAM dan FDI tidak bisa disangkut pautkan secara langsung.

*Bottleneck effect* ini merupakan sebuah konsep yang penulis ambil dari salah satu literatur milik Vadlamannati (2018) berjudul "*Human Rights Shaming and FDI: Effects of the Human Rights Commission and Council*", ada beberapa konsep yang digunakan, yaitu *Outcast effect*, *bottleneck effect* dan *human rights concerns*. Penelitian ini akan menggunakan *bottleneck effect* untuk meneliti lebih dalam efek dari keterlibatan pemerintah terhadap pelanggaran HAM terhadap angka FDI. Pada dasarnya, konsep *bottleneck effect* ini menjelaskan bahwa sebuah tindakan akan lebih ampuh jika kecaman datang dari UNHRC sebagai komisi tertinggi HAM. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa NGO dan aktor non-negara juga dapat ikut andil dalam mengancam suatu negara.

*Bottleneck effect* menjelaskan bahwa ketika sebuah pemerintah melakukan atau terlibat pelanggaran HAM, investor maupun perusahaan yang terlibat di negara tersebut akan mendapatkan reputasi yang tidak baik. Mereka akan dianggap oleh

dunia internasional telah mendanai pemerintahan yang tidak menghormati HAM tersebut. Maka dari itu, banyak perusahaan maupun investor yang kemudian mendaftarkan diri mereka ke agensi-agensi seperti U.N. Global Compact dan ISO 26000 sebagai bentuk bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap HAM dan akan dihukum jika tidak menghormati HAM.

Vadlamannati (2018) kemudian mengutip tulisan Barry yang berpendapat bahwa kritisasi yang dilakukan oleh NGO terhadap negara represif mampu menekan angka FDI akibat dari reputasi yang buruk terhadap HAM (Vadlamannati, 2018, hal. 225). Namun Vaddlamannati (2018) mengatakan bahwa efek yang dilakukan NGO tidak terlalu signifikan karena yang memiliki wewenang lebih kecil jika dibandingkan dengan UNHRC. Efek yang diberikan NGO ini kemudian akan berujung ke pemberitaan yang dilakukan oleh media internasional (Vadlamannati, 2018, hal. 225). Media internasional ini lah yang berperan dalam memberitakan dan memperlihatkan reputasi suatu negara ketika terlibat dengan pelanggaran HAM.

Vaddlamannati (2018) kemudian mengatakan bahwa setiap perusahaan maupun investor pada dasarnya memiliki kepentingannya masing-masing tidak hanya melihat dari satu indikator saja. Ada perusahaan yang mementingkan *brand image*, melihat negara dari sumber dayanya, dan lain-lain. Itulah yang membuat HAM bisa saja bukan menjadi faktor pendukung dalam berinvestasi di negara-negara represif (Vadlamannati, 2018, hal. 234).

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis susun merupakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif. Menurut buku Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi karya Mochtar Masoed dikatakan bahwa penelitian eksplanatif biasanya ditujukan untuk menjawab rumusan masalah “mengapa” (Masoed, 1990, hal. 79). Penelitian ini akan dilakukan dengan menjelaskan kejadian yang ada dan menganalisa dampak yang terjadi.

Data yang diambil untuk melakukan penelitian ini berasal dari sumber data sekunder dimana data tersebut merupakan data yang tidak langsung. Data tersebut berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, dokumentasi, wawancara, situs pemerintah, maupun artikel yang diambil dari situs-situs kredibel yang berasal dari internet. Sumber data tersebut akan dijadikan sebagai sumber untuk melakukan penelitian ini.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Analisis Peningkatan Angka FDI Arab Saudi di Tengah Isu Pelanggaran HAM dengan Konsep *Bottleneck Effect***

Tidak sedikit investor yang sempat menumpahkan kekecewaannya ketika pemerintah Arab Saudi terlibat di kasus pelanggaran HAM. Kasus Jamal Khashoggi merupakan salah satu kasus yang menggemparkan dunia internasional. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi sempat mendapatkan pujian karena tindakan mereka yang dianggap reformis dengan mencabut beberapa peraturan yang dianggap tidak sejalan dengan HAM. Namun, pujian tersebut tidak terlalu lama

membangun *image* Arab Saudi sebagai negara yang menghormati HAM setelah adanya kasus Jamal Khashoggi. Kasus Jamal Khashoggi terjadi tidak lama sebelum konferensi *Foreign Investment Initiative* (FII) di Riyadh diadakan. Kasus tersebut membuat para investor ragu untuk datang ke konferensi tersebut karena kecaman dunia internasional yang lumayan keras.

Para investor *Silicon Valley* menjadi salah satu contohnya. Kekecewaan sempat dilontarkan oleh Steve Case, mantan kepala eksekutif perusahaan AOL. Dalam akun *twitter*-nya, ia sempat mengatakan tidak akan mengunjungi konferensi keuangan Arab Saudi. Sam Altman, kepala Y Combinator, juga akan menahan sementara rencana pembangunan NEOM yaitu *smart city* milik Arab Saudi yang akan menghabiskan dana sekitar 500 milyar dollar (Vox Recode, 2018). Pembangunan NEOM sangat bergantung dari dana para investor asing. Pembangunan NEOM ini pun membutuhkan Dewan Penasehat yang terdiri dari Ernest Moniz (Sekretaris Energi AS), Dan Doctoroff (Sidewalk Labs), Sam Altman (Y Combinator), dan Neelie Kroes (mantan wakil presiden Komisi Eropa) (Vox, 2018). Pembangunan NEOM terhambat jika pemerintah Arab Saudi masih terlibat dengan pelanggaran HAM yang terjadi.

Mark Mobius, seorang pendiri Mobius Capital Partners mengkritisi keterlibatan Arab Saudi terhadap pelanggaran HAM dan mengatakan bahwa adanya kasus pembunuhan Jamal Khashoggi bukan waktu yang tepat untuk berinvestasi di Arab Saudi (CNBC, 2019). Ia berpendapat bahwa kasus pembunuhan

Jamal Khashoggi merupakan kasus yang membuat situasi terlihat buruk pada saat itu. Pada kenyataannya juga, kasus Jamal Khashoggi menjadi *turning point* bagi para investor untuk menahan investasi mereka. Tak hanya investor, pada konferensi tahunan G20, MBS terlihat terasingkan dari beberapa pemimpin negara-negara Eropa (NPR, 2019). Bahkan anggota dewan di Amerika Serikat sempat ingin memberhentikan bantuan senjata ke Arab Saudi karena pelanggaran HAM yang dilakukan Arab Saudi di perang sipil Yaman, namun hal ini di veto oleh Donald Trump (NPR, 2019).

Kecaman dunia ini menjadi bentuk dari *economic sanctions* yang dikutip dari buku milik Baehr dan Holleman di buku yang berjudul "*The Role of Human Rights in Foreign Policy*" yaitu *Avoiding involvement in human rights violations* dan *Showing of solidarity and moral support to the victims*. Kedua tindakan tersebut terbukti saat para investor menahan sementara investasinya atau melakukan adanya keterlibatan dengan pemerintah yang terlibat dengan pelanggaran HAM. Kemudian tidak sedikit juga NGO yang sudah mulai melakukan gerakan-gerakan kecil untuk mengundang dunia agar menyoroti korban pelanggaran HAM di Arab Saudi.

Tidak hanya organisasi HAM saja yang mengecam tindakan Arab Saudi dalam menangani HAM, namun negara-negara juga sudah mulai bergerak. Tiga puluh enam negara, termasuk dua puluh delapan negara Uni Eropa, menandatangani surat terbuka yang mengkritisi perlakuan Arab Saudi terhadap HAM di pertemuan UNHRC (CNN,

2019). Bentuk kedua *economic sanctions* ini mampu membuat para investor menghindar dan lebih berhati-hati dengan pemerintah Arab Saudi atas keterlibatan mereka dengan pelanggaran HAM yang terjadi.

Menurut Blanton dan Blanton (2007) dalam literturnya yang berjudul "*What attract foreign investors? An examination of human rights and foreign direct investment*", negara yang memiliki tingkat represi yang tinggi justru menjadi pusat perhatian para investor. Banyak investor yang justru tertarik dengan negara-negara represif karena memudahkan mereka untuk mengeksploitasi negara tersebut (Blanton dan Blanton, 2007, hal. 145). Namun, hal itu sudah tidak berlaku lagi. Blanton dan Blanton (2007), mengatakan bahwa banyak investor yang kemudian tidak mau terlibat dengan negara represif karena takut menjadi sorotan dunia internasional yang akan mengganggu reputasi mereka. Inilah yang membuat HAM sudah mulai dilirik oleh para investor asing.

Hal ini juga sudah dibahas oleh Vaddlamannati dalam *bottleneck effect*-nya, yang menjelaskan bahwa investor yang berinvestasi di negara yang tidak menghormati HAM cenderung akan mendapatkan reputasi yang kurang baik juga. Dunia internasional akan menganggap bahwa investor-investor tersebut turut berkontribusi dalam mendanai pemerintah yang represif tersebut. Maka dari itu, angka FDI pada suatu negara pun dapat berkurang karena adanya pelanggaran HAM. Beberapa alasan pun menjadi indikator bagaimana Arab Saudi tetap meningkatkan

angka FDI di tengah isu HAM yang terjadi, berikut alasan-alasan tersebut.

a. Tidak Adanya Sanksi Tegas dari UNHRC Sebagai Bentuk Ancaman terhadap Pemerintah Arab Saudi

Di tengah-tengah kecaman dunia internasional, pemerintah Arab Saudi pun menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap angka FDI Arab Saudi. Arab Saudi secara perlahan mulai memperlihatkan kemajuannya dalam FDI *inflows* pada tahun 2017 ke tahun 2018, walaupun pada tahun 2017 adalah tahun terburuk bagi FDI *inflows* Arab Saudi. Para ekonom berpendapat bahwa penurunan drastis ini diakibatkan oleh turunnya harga minyak dunia (Gulf Business, 2018). Para investor pun terlihat lebih waspada menanamkan investasi di negara-negara *gulf* khususnya Arab Saudi. Dapat disimpulkan bahwa investor ini lebih khawatir terhadap keadaan ekonomi suatu negara dibandingkan HAM.

*Economic sanctions* yang sudah dibahas dalam sub-bab sebelumnya seolah tidak begitu berefek terhadap Arab Saudi. Dalam konsep *bottleneck effect* ditekankan kembali memang NGO dan media memiliki peran untuk melakukan *shaming* terhadap negara yang terlibat pelanggaran HAM. Namun NGO dan media tidak memiliki wewenang khusus layaknya komisi tinggi HAM seperti UNHRC. Inilah yang menjadi salah satu sebab Arab Saudi masih mempertahankan angka FDI ditengah pelanggaran HAM yang terjadi. Pemerintah Arab Saudi, khususnya MBS hingga kini belum menerima adanya sanksi tegas dari UNHRC. Semenjak terlibat dengan pelanggaran HAM yang terjadi di tahun

2017-2018, selama ini pemimpin negara dan NGO hanya sebatas mengirimkan kecaman tanpa adanya aksi tegas.

Menurut buku karya Baehr dan Holleman (2004) ikatan ekonomi suatu negara bisa menjadi suatu *dilemma* dalam menangani HAM. Banyak negara-negara yang tadinya sudah sepakat untuk memberikan sanksi kepada suatu negara, akhirnya membatalkan sanksi tersebut sebelum disahkan karena negara-negara tersebut memiliki kepentingan ekonomi atau ikatan kerja sama dengan negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM (Baehr dan Holleman, hal. 45, 2004).

Masih banyak hal yang harus diperhitungkan kembali untuk dapat memberikan sanksi ke Arab Saudi. Terlebih lagi, Arab Saudi merupakan negara dengan sumber daya minyak yang menjadi perhitungan bagi negara-negara dengan kekuatan militer besar seperti Amerika Serikat. Memberikan sanksi tegas kepada Arab Saudi akan mengganggu hubungan Arab Saudi dan kepentingan ekonomi dengan negara-negara besar tersebut. Seperti yang diketahui bahwa tujuan Arab Saudi menyusun KSA Vision 2030 juga ingin melakukan reformasi dan modernisasi terhadap kehidupan masyarakat Arab Saudi. Jika sanksi yang ditujukan oleh dunia Internasional tidak sesuai dengan tujuh cara milik Van Geungten tersebut, dikhawatirkan sanksi tersebut bukan membawa keadilan bagi Arab Saudi namun sebaliknya. Maka dari itu *economic sanctions* belum sepenuhnya diterapkan untuk pemerintah Arab Saudi. Inilah yang membuat Arab Saudi tetap menjalankan dan menarik

investor asing dengan cara lain ditengah-tengah kecaman dari dunia internasional.

b. Peningkatan angka FDI Arab Saudi Melalui Kebijakan-Kebijakan dan Memulihkan Kembali Reputasi Negara

Selain HAM, tentunya masih banyak indikator lain yang lebih dominan untuk memutuskan menanam investasi di suatu negara. Investor cenderung menggunakan angkatan kerja sebagai indikator utama untuk menanamkan investasi di suatu negara. Ini lah yang membuat Arab Saudi tetap menjadi pilihan bagi investor asing. Seperti yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa Arab Saudi menyajikan situs daring yang khusus memberikan informasi dan fasilitas mengenai investasi di Arab Saudi yang dinamakan Invest Saudi.

seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Angkatan kerja merupakan salah satu indikator penting bagi investor. Di negara yang tergolong sangat bergantung dari hasil ekonomi minyak, jumlah angkatan kerja yang ditawarkan akan menjadi poin tambah bagi investor. Menurut situs daring Invest Saudi, Arab Saudi memiliki 6.08 juta angkatan kerja berkualitas (Invest Saudi, 2019). Ditambah lagi bahwa ada 50% populasi anak muda dengan rata-rata umur dibawah 25 tahun. Ini lah yang menjadi poin tambah bagi Arab Saudi untuk mengundang para investor asing. *Trend* diversifikasi ekonomi pun membuat investor juga akan fokus terhadap kualitas dari angkatan kerja suatu negara. Arab Saudi pun membuktikan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja mereka.

Kemudian, KSA Vision 2030 juga menanamkan nilai kesetaran dan

memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkerja. Bagi dunia internasional ini adalah langkah awal bagi Arab Saudi yang mulai peduli dengan peran perempuan. Namun untuk para investor, ini merupakan upaya yang baik untuk menanamkan investasi. Keseriusan pemerintah Arab Saudi dalam menaikkan perekonomian Arab Saudi pun terlihat bagaimana pemerintah Arab Saudi dan MISA, membentuk Invest Saudi sebagai wadah khusus menangani investor yang masuk. Ditambah lagi, pemerintah Arab Saudi, lewat KSA Vision 2030 nya juga menawarkan program privatisasi.

Selain membuat kebijakan untuk mengundang investor asing, Pemerintah Arab Saudi pun juga berusaha memulihkan kembali reputasi mereka setelah beberapa pelanggaran HAM sempat merusak reputasi mereka setelah beberapa kali terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Salah satu upayanya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi adalah dengan menuangkan dananya kepada suatu perusahaan lobi terbesar di dunia yaitu Qorvis Communications atau MSLGroup (NPR. 2019). Menurut NPR, Saudi Arabia menghabiskan dana 18 juta dollar untuk melakukan upaya *public relations* dengan Qorvis Communications dalam memperbaiki reputasinya. Gerardo Zamorano, seorang pengelola dana, sempat mengunjungi Arab Saudi dan tertarik akan diversifikasi ekonomi yang ia lihat bahkan tertarik dengan adanya peningkatan angkatan kerja perempuan dibanding kasus Jamal Khashoggi (Business Insider, 2019).

c. Keadaan Ekonomi dan Sosial Arab Saudi yang Dianggap Mulai Membaik.

Pembahasan sebelumnya telah membuktikan bahwa memang Arab Saudi sudah melakukan beberapa upaya untuk terus meningkatkan kualitas meraka agar menjadi daya tarik para investor. Hal tersebut bisa dibuktikan dari beberapa kebijakan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kebijakan tersebutlah yang kemudian membuat Arab Saudi menjadi negara yang baik untuk berinvestasi. Menurut *2019 Doing Bussiness Report*, sebuah laporan yang memaparkan kemudahan melakukan bisnis di suatu negara, memaparkan bahwa Arab Saudi ada diperingkat ke-62 dari 190 (*Doing Bussiness*, 2019). Arab Saudi juga menjadi negara dengan index transparansi tinggi dengan poin 9.0 dibandingkan dengan Amerika dan Jerman (Nordea Trade, 2019).

Arab Saudi sendiri memberikan bukti bahwa mereka dalam tahap awal untuk lebih memperhatikan HAM masyarakatnya sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai pemerintah. Tahun 2018 menjadi momentum besar bagi perempuan-perempuan Arab Saudi untuk bisa mengemudi lebih leluasa. Pencabutan aturan larangan mengemudi bagi perempuan ini dilakukan untuk memudahkan para perempuan bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Arab Saudi. Mengutip Blanton dan Blanton (2007), bahwa HAM memang mempengaruhi FDI secara langsung dan tidak langsung. Pencabutan aturan tersebut termasuk dalam pengaruh tidak langsung yang dipaparkan oleh Blanton dan Blanton (2007), bahwa negara yang mulai memperhatikan HAM justru akan

menunjukkan peningkatan dalam kehidupan yang kondusif dan menghasilkan sumber daya manusia yang baik (Blanton dan Blanton, 2007, hal. 153). Hal positif tersebut mampu memberi daya tarik sendiri bagi para investor asing. Dengan begitu, pemerintah Arab Saudi dianggap mampu memperbaiki sumber daya manusia oleh para investor-investor tersebut sebagai langkah kecil mengawali reformasi di bidang HAM.

Pelanggaran HAM yang terjadi memang tidak terlalu berdampak terhadap FDI *inflows* Arab Saudi. Bagi investor, keadaan HAM di suatu negara adalah sebagian kecil dari keadaan keseluruhan. Menurut, Adam Coogle, peneliti dari Human Rights Watch, mengatakan bahwa semua hal yang dilakukan oleh para pebisnis maupun investor asing untuk mengkritisi keadaan HAM di Arab Saudi adalah salah satu cara mengancam pemerintah mereka merupakan pemikiran polos (The Washington Post, 2019). HAM masih dianggap sebagai *gimmick* sementara. Ketika kepentingan politik suatu negara menjadi penting, maka HAM pun akan dikesampingkan demi memenuhi kepentingan politik yang lain. Gambaran tersebut membuktikan bahwa para investor tidak ragu untuk berinvestasi di Arab Saudi hanya karena ada kasus HAM yang terjadi walaupun pada awalnya mereka akan ragu-ragu, namun keraguan tersebut tidak akan bertahan lama selama ada kebijakan yang menguntungkan investor.

## **5. KESIMPULAN**

Keterlibatan pemerintah Arab Saudi dengan HAM yang terjadi memang bukanlah hal yang pertama kali terjadi di Arab Saudi.

Negara yang dikenal represif ini memiliki catatan buruk mengenai pelanggaran HAM. Pada tahun 2016, Pemerintah Arab Saudi dan MBS pun muncul dengan ide untuk membuat KSA Vision 2030. KSA Vision 2030 adalah *blueprint* kebijakan yang akan membawa ekonomi Arab Saudi yang lebih baik pada tahun 2030. Adanya KSA Vision 2030 ini diharapkan ekonomi Arab Saudi tidak lagi sepenuhnya bergantung dengan sektor minyak lagi melainkan membuka peluang di sektor lainnya, seperti pariwisata, kimia, telekomunikasi, dan lain-lain. Naikannya MBS sebagai wakil perdana menteri juga memudahkan MBS untuk merealisasikan KSA Vision 2030.

Menurut pernyataan milik Baehr dan Holleman yaitu *Economic sanctions*, yang menjelaskan adanya *Avoiding involvement in human rights violations* dan *Showing of solidarity and moral support to the victim* pun dilontarkan kepada pemerintah Arab Saudi sebagai ancaman bahwa pemerintah Arab Saudi kurang tegas dalam mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM. Para investor pun menarik diri dari Arab Saudi agar tidak mendapati kecaman dunia internasional dan tidak ingin terlibat maupun reputasi mereka tercoreng dari apa yang dibuat oleh Arab Saudi. Dalam konsep *bottleneck effect*, dikatakan bahwa negara yang memiliki catatan pelanggaran HAM kurang baik akan berdampak terhadap FDI *inflow* suatu negara. Maka dari itu, penting bagi suatu negara untuk menghormati HAM.

*Shaming* yang dilontarkan oleh dunia internasional akan berpengaruh terhadap FDI *inflow* karena para investor tersebut tidak mau terdampak langsung dari

*shaming* tersebut. Namun, Vaddlamannati pun menekankan bahwa *shaming* yang dilakukan oleh media dan NGO tidak terlalu berefek. Berbeda dengan *shaming* dan sanksi yang diberikan oleh komisi tinggi HAM. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor yang membuat FDI Arab Saudi tetap menunjukkan peningkatan. Ditambah, Arab Saudi juga telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus yang memudahkan para investor masuk ke Arab Saudi. Arab Saudi juga memiliki situs daring yang dinamakan Invest Saudi sebagai situs yang menyediakan laporan dan fasilitas bagi para investor.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Albergotti, Robert dkk. (2019). *As Backlash Fears Fade, Major Firms are Returning to Saudi Arabia a Year After Khashoggi's Killing*. The Washington Post. Diakses melalui [https://www.washingtonpost.com/world/middle-east/as-backlash-fears-fade-major-firms-are-returning-to-saudi-arabia-a-year-after-khashoggis-killing/2019/09/30/db73829a-defb-11e9-be7f-4cc85017c36f\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/middle-east/as-backlash-fears-fade-major-firms-are-returning-to-saudi-arabia-a-year-after-khashoggis-killing/2019/09/30/db73829a-defb-11e9-be7f-4cc85017c36f_story.html) pada tanggal 28 Mei 2020.
- Altaher, Nada. (2019). *Saudi Arabia Criticized over human rights by 36 countries*. CNN. Diakses melalui <https://edition.cnn.com/2019/03/07/middleeast/saudi-arabia-criticism-intl/index.html> pada tanggal 23 September 2019

- Amos, Deborah. (2019). *Saudi Kingdom Tries to Prevent More Women From Fleeing*. NPR. Diakses melalui <https://www.npr.org/2019/03/13/701570312/saudi-kingdom-tries-to-prevent-more-women-from-fleeing> pada tanggal 18 Juni 2020
- Baehr, P.R. dan Holleman, M.C. (2004). *The Role of Human Rights in Foreign Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Blanton, S. L., & Blanton, R. G. (2006). Human Rights and Foreign Direct Investment: A Two-Stage Analysis. *Business & Society*, 45(4), 464–485. <https://doi.org/10.1177/0007650306293392> pada tanggal 15 April 2020
- Blanton, S., & Blanton, R. (2007). What Attracts Foreign Investors? An Examination of Human Rights and Foreign Direct Investment. *The Journal of Politics*, 69(1), 143-155. doi:10.1111/j.1468-2508.2007.00500.x pada tanggal 24 Oktober 2020
- Chen, James. (2020). *Foreign Direct Investment (FDI)*. Investopedia. Diakses melalui <https://www.investopedia.com/terms/f/fdi.asp> pada tanggal 20 April 2020
- Doing Business. (2019). *Ease of Doing Business Rankings*. The World Bank. Diakses melalui <https://www.doingbusiness.org/en/rankings> pada tanggal 24 Oktober 2020.
- Elimam, Haga. (2017). Determinants of Foreign Direct Investment in Saudi Arabia: A Review. (9)7. 222-227. Diakses melalui <https://doi.org/10.5539/ijef.v9n7p222> pada tanggal 10 Januari 2020
- Garriga, Ana Carolina. (2016). *Human Rights Regimes, Reputation, and Foreign Direct Investment*. *International Studies Quarterly*. (60) 160-172. Diakses melalui [10.1093/isq/sqw006](https://doi.org/10.1093/isq/sqw006) pada tanggal 15 April 2020
- Invest Saudi. (2019). *Investment Highlights – A Special Report by SAGIA – Fall 2019*. Diakses melalui <https://investsaudi.sa/en/> pada tanggal 22 Oktober 2020.
- Masoed, Mochtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Nordea Trade. (2019). *Saudi Arabia: Investing in Saudi Arabia*. Nordea Trade. Diakses melalui <https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/saudi-arabia/investment> pada tanggal 24 Oktober 2020
- Northam, Jackie. (2019). *Investors Are Back in Saudi Arabia A Year After Khashoggi's Killing*. npr. Diakses melalui <https://www.npr.org/2019/10/02/766494653/investors-are-back-in-saudi-arabia-a-year-after-khashoggis-killing> pada tanggal 15 April 2020
- Renshaw, Jarrett. (2018). *JP Morgan and Ford cancel plans for Saudi investor*

- event*. Reuters. Diakses melalui <https://www..com/article/us-saudi-politics-dissident-ford-idUSKCN1MO0VU> pada tanggal 24 Oktober 2020
- Reuters. (2018). *Foreign Investment in Saudi at 14 year low despite reforms*. Gulf Business. Diakses melalui <https://gulfbusiness.com/foreign-investment-saudi-14-year-low-despite-reforms/> pada tanggal 20 Februari 2020
- Saudi Government. (2018). *KSA Vision 2030: Strategic Objectives and Vision Realization Program*. Diakses melalui situs daring resmi KSA <https://vision2030.gov.sa/en> pada tanggal 26 Februari 2019
- Schleifer, Theodore. (2018). *If Silicon Valley investors cared about Saudi human rights abuses, they'd do more than a snub conference*. Vox Recode. Diakses melalui <https://www.vox.com/2018/10/11/17966354/> pada tanggal 15 April 2020
- Turak, Natasha. (2019). *Mark Mobius doesn't think anyone should be investing in Saudi Arabia*. CNBC. Diakses melalui <https://www.cnbc.com/2019/01/08/mark-mobius-doesnt-think-anyone-should-be-investing-in-saudi-arabia--and-sees-disaster-ahead-.html> pada tanggal 29 April 2020
- World Bank. (2018). Table: CC BY-4.0: Foreign Direct Investment , net inflows (%of GDP) - Saudi Arabia 2015-2018. Diakses melalui <https://data.worldbank.org/indicat> or/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=SA 10 Januari 2020